

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini sorotan masyarakat terhadap lembaga DPR Republik Indonesia nampaknya kian negatif karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat semakin sirna lantaran banyak kasus politik yang melibatkan segelintir wakil-wakil rakyat yang diberi amanah. Pada dasarnya Anggota DPR Republik Indonesia adalah perpanjangan tangan langsung rakyat melalui medium partai politik. Anggota DPR Republik Indonesia saat ini banyak mendapatkan persoalan dan isu berat yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan kepercayaan politik oleh masyarakat. Mulai dari masalah kecil hingga masalah besar yang berimplikasi langsung tidak hanya kepada anggota DPR Republik Indonesia tetapi langsung tertuju pada citra lembaga DPR Republik Indonesia.

Penyebab semakin terpuruknya citra DPR Republik Indonesia sangat pelik dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Pasalnya dalam menjalankan fungsinya DPR periodesekarang dinilai sangat rendah kinerjanya terutama fungsi legislasi. DPR sebagai salah satu lembaga dari sistem politik di Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945, adalah sebuah lembaga hidup. Citra DPR yang malas, lemah dan loyo belum berubah selama beberapa periode. Apalagi tidak adanya lembaga khusus yang ditugaskan untuk melakukan kontrol terhadap lembaga legislatif tersebut (Sulistiyowati, 2011 hlm.75).

Banyak contoh yang dapat membuktikan bahwa DPR sedang berada di titik nol. Misalnya, kegagalan pembentukan Panitia Khusus Badan Urusan Logistik (Pansus Bulog), rendahnya tingkat kehadiran dalam setiap rapat paripurna, keengganan untuk melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), beberapa anggota DPR RI tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Pergerakan menuju titik nol terasa sejak DPR mulai kehilangan kemampuan dalam merespon dan mengekspresikan kepentingan publik. Beberapa kasus yang dikemukakan di atas hanya sedikit dari sekian

banyak contoh negatif yang di alamatkan ke DPR selama ini. Padahal, banyak kalangan di luar DPR mengharapkan agar lembaga ini muncul dengan komitmen dan moralitas politik yang tinggi untuk membawa negeri ini keluar dari multikrisis yang telah menghabiskan waktu lebih dari lima tahun. Harapan agar DPR menjadi lokomotif perubahan hanyalah impian belaka (Saldi Isra, hlm.18 2002).Seperti salah satu contoh kasus yang akhir tahun lalu santer diberitakan pada suatu berita online yang isi beritanya adalah tentang anggota DPR RI banyak menjadi sorotan publik.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, indeks kepercayaan publik kepada DPR di tahun ini mencapai 40 persen. Angka tersebut jauh menurun dibanding 2012 lalu sebesar 57,40 persen, atau Desember 2010 yang menyentuh 62,30 persen. Hal tersebut tak lepas dari tendensi negatif pemberitaan media terkait kasus 'papa minta saham' yang melibatkan pimpinan DPR. Sejak kasus itu mencuat ke publik, pemberitaan terhadap perkara ini cenderung negatif. Alhasil, dari analisis media yang dilakukan LSI, pengaruh pemberitaan bernada negatif oleh media turut berperan sebesar 89,70 persen. Publik pun langsung menanggapi secara sinis kasus tersebut. Hasil analisis media LSI yaitu 89,70 persen pemberitaan media bernada negatif terhadap keterlibatan pimpinan DPR tersebut. (Viva.com :Suryanta Bakti Susila, Anwar Sadat).

Logika yang berkembang saat ini di masyarakat bahwa “satu anggota yang melakukan kesalahan, maka dampaknya semua anggota akan mendapat predikat yang sama seperti anggota yang melakukan kesalahan ” itu merupakan logika yang berkembang murni secara otoriter dan akhirnya meluas hingga lembaga DPR RI tidak lagi mendapat kepercayaan dan simpati dari masyarakat. Disinilah peran Humas DPR Republik Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengembalikan, menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah DPR Republik Indonesia. Menurut British Institute *Public Relations* dalam artikel online Muhammad Badri (2009) mendefinisikan Humas (PR) adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik atau *good-will* dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Elis W, 2013 hlm.429).

Humas memiliki tugas untuk menciptakan, membangun atau mempertahankan citra dihadapan publik. Dalam menciptakan ataupun mempertahankan citra suatu lembaga dapat dilakukan dengan menanamkan kepercayaan kepada para *stakeholders*, yaitu publik internal maupun eksternalnya. Diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membentuk sebuah citra. Citra akan mampu terlihat atau terbentuk melalui strategi komunikasi yang tepat.

Proses pembentukan citra dimulai dari penerimaan secara fisik (panca indra) masuk ke saringan perhatian (*attention filter*) dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dimengerti atau dilihat (*perceived message*), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya citra (Elis W, 2014 hlm.431).

Strategi Humasnya dengan menanamkan kepercayaan kepada publik saja tidaklah cukup untuk memperoleh citra positif. Citra positif yang sudah dibangun perlu dipertahankan dan dimaintain, karena erat kaitannya dengan reputasi organisasi. Begitu kepercayaan publik luntur karena reputasi yang negatif, maka akan sulit untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Pelaksanaan strategi yang tepat melalui program-program lembaga pemerintah yang dapat meningkatkan publisitas lembaga pemerintah dihadapan *stakeholders*, dengan menanamkan kepercayaan serta membangun reputasi positif merupakan cara memperoleh citra yang baik.

Salah satu program yang dibuat oleh Humas Setjen DPR Republik Indonesia untuk mebangun dan menjaga citra lembaga adalah dengan melakukan edukasi melalui penerimaan Kunjungan Masyarakat. Baik masyarakat umum yang berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, maupun komunitas. Program Kunjungan Masyarakat tersebut mulai direalisasikan pada tahun 2010. Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Program Kunjungan Masyarakat Dalam Membangun Citra DPR RI”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil rumusan permasalahannya yaitu **Bagaimana Program Kunjungan Masyarakat Humas Setjen DPR RI dapat membangun citra DPRRI.**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini dilakukan untuk **mendalami dan menggambarkan tentang Program Kunjungan Masyarakat Humas Setjen DPR RI dalam membangun citra DPR RI.**

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian manfaat, penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat yang diharapkan berdasarkan teori yang digunakan dan terkait dengan penelitian ini adalah dapat memberikan masukan pengetahuan pada perkembangan ilmu komunikasi di bidang perancangan program eksternal humas khususnya *community relations*.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan sekaligus menambah kajian studi Ilmu komunikasi penulis, terutama untuk masyarakat, kalangan akademisi, komunitas humas, yang dapat memperoleh gambaran mengenai manfaat program *community relations* dalam membangun citra suatu lembaga pemerintahan.

I.5 Luaran Yang Di Harapkan

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi mengenai program *community relations* dalam membangun citra lembaga pemerintahan khususnya di DPR Republik Indonesia dalam program kunjungan masyarakat karena dalam penelitian ini peneliti mengangkat objek demikian.

Diharapkan pula setelah masyarakat membaca penelitian ini, mereka dapat meningkatkan rasa simpati atau bahkan empati terhadap lembaga terkait, pada dasarnya program kunjungan masyarakat yang dilakukan oleh Humas Setjen DPR Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun citra, rasa *awareness*, empati, dan sudut pandang publik yang bersifat negatif tentang DPR Republik Indonesia bisa berubah menjadi positif.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi dalam lima bab :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, luaran yang diharapkan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya teori komunikasi, teori humas, humas dalam lembaga pemerintahan, tujuan dan fungsi humas, kegiatan kehumasan, *community relations*, citra dan membangun citra.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, waktu dan lokasi penelitian, fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan terhadap masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi buku yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini serta sumber-sumber yang menunjang penulisan penelitian ini.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisikan data-data pendukung untuk penelitian.